

Demokrasi Versus Teokrasi (Antara Teori dan Praktik)

Biyanto

Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article views popular themes discussed by Muslim politicians, namely democracy and theocracy. While democracy builds governmental system based on public sovereignty, theocracy is based on the sovereignty of God. We often hear ideas of democracy used in several contexts, for example, people democracy, popular democracy, and guided democracy. Moreover, in Indonesia, the term of "Demokrasi Pancasila" is well known. To some Muslim politicians, democracy is viewed as an idea coming from Western countries or Christian traditions and thus, it is understood as an infidels' idea. Some other Muslim politicians view democracy as an idea which is compatible with Islamic teachings, especially with the concept of *shura*. In fact, most Muslim politicians prefer theocracy to democracy. Al-Maududi is one of Muslim politicians who has the view. Furthermore, he introduced a new term, *theo-democracy*, as an answer of the dispute.

Keyword: demokrasi, teokrasi, teodemokrasi

Pendahuluan

Menurut Aristoteles (384-322 SM), manusia adalah makhluk yang berpolitik (*zoon politicon*) dan makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia senantiasa memiliki hasrat bermasyarakat (bernegara), sehingga tidak pernah manusia hidup di luar suatu jenis kekuasaan apa pun. Manusia akan menjadi makhluk sempurna jika hidup dalam suatu ikatan kenegaraan.¹ Untuk mengaktualisasikan potensi kodratinya tersebut, manusia membutuhkan tatanan

sistem politik, makna dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan sosial, dan teori-teori yang menjadi dasar terbentuknya negara sebagai organisasi sosial politik yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama. Implementasi dari gagasan tentang sistem politik sepanjang sejarah peradaban umat, jika dilacak dalam sudut panjang sejarah setidaknya dapat dikelompokkan menjadi dua mazhab besar, yakni sistem demokrasi dan sistem teokrasi.

Topik ini bermaksud membahas perkembangan konsep demokrasi dan teokrasi seperti yang digagas para pemikir. Sebagai dua sistem politik yang

¹Paul Edwards, *The Encyclopedia of Philosophy*. London: Collier Macmillan Publisher, (1972) 151.